



## EDITORIAL

Pada Volume 2 Nomor 1, Padjir mempersembahkan beberapa artikel yang mengupas masalah power, kebijakan luar negeri, faktor identitas, *state-terrorism*, kerja sama internasional, desekuritisasi, dan diplomasi digital.

Pada artikel pertama, Anton Pratomo Sunu menelaah tentang perdagangan internasional, khususnya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, dari aspek *Power*. Dalam melaksanakan perdagangan internasional, negara-negara berkembang seringkali berada di dalam posisi kurang menguntungkan dibandingkan negara-negara kuat dalam hal relasi power dan institusi internasional.

Dalam artikel kedua, Atanta Gian dan Akim memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Reorientasi kebijakan luar negeri antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dalam hal ini, menjadi faktor utamanya.

Dalam artikel ketiga, Dwi Aulia Putri membahas mengenai faktor identitas yang berpengaruh terhadap orientasi kebijakan suatu negara, yakni faktor identitas masyarakat Ukraina. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Ukraina memiliki kecenderungan positif terhadap nilai-nilai Barat, seperti: perlindungan hak asasi manusia, toleransi budaya lain dan kebebasan beragama, kebebasan individu dan demokrasi, serta

kesejahteraan masyarakat dan mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam keseharian.

Dalam artikel keempat, Kiagus Zaenal Mubarak membahas mengenai *state-terrorism* yang dilakukan oleh negara Israel. Dalam argumentasinya, penulis menyampaikan bahwa Israel memenuhi ketiga karakteristik terorisme, yaitu melakukan kekerasan, menciptakan ketakutan di tengah populasi, dan aksi kekerasan itu bertujuan untuk mengubah perilaku bangsa Palestina agar tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan mereka.

Dalam artikel kelima, Elissa Priyanka menjelaskan tentang kerja sama UNICEF dan Indonesia dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Kerja sama ini berhasil menyekolahkan kembali 17.000 anak usia sekolah yang berimbas pada peningkatan angka indikator pencapaian pendidikan dasar Indonesia. Hal ini menunjukkan keberhasilan advokasi yang dilakukan UNICEF terhadap pemerintah Indonesia.

Dalam artikel keenam, Fardha Dewi Shinta memaparkan tentang desekuritisasi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump dalam isu perubahan iklim. Upaya desekuritisasi tersebut dilakukan melalui pernyataan untuk menstabilkan masalah perubahan iklim, dan masalah itu digantikan dengan masalah lain yang lebih mengancam seperti masalah ekonomi, imigran, dan teroris.

Dalam Artikel ketujuh, Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah menjelaskan mengenai

Diplomasi Digital yang dilakukan pemerintah Indonesia selama 2014-2019 dalam rangka melakukan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Keduanya menemukan bahwa diplomasi digital tersebut mampu membuat proses pengaduan dan penyelesaian masalah mengenai WNI lebih efektif, efisien, serta kredibel.

Dalam artikel *terakhir*, Bella Rachmanaila dan Akim menjelaskan hubungan kerja sama perdagangan pelumas otomotif antara PT Pertamina Lubricants dengan Indonaldini Group Swiss-SA. Kerja sama tersebut telah melalui tiga tahap, yaitu: *bargaining*, *agreement*, dan *enforcement* sehingga mampu menjadi salah satu solusi perdagangan pelumas otomotif untuk menembus pasar Eropa.

Hormat Kami,  
Dewan Editor